

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara berdasarkan Permendikbudristek No. 56/M/2022 dan No. 262/M/2022 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses komunikasi dalam implementasi kurikulum Merdeka di SMK Negeri Kabupaten Batu Bara telah memperlihatkan keberhasilan dalam memastikan kejelasan informasi dari tingkat puncak (atas) hingga ke tingkat implementator terendah, yaitu guru. Forum-forum sosialisasi, webinar, workshop, pelatihan, dan bimbingan teknis menjadi sarana efektif dalam menyampaikan informasi secara jelas dan dapat difahami. Kesesuaian temuan penelitian ini dengan kerangka teori Edwards III terletak pada penekanan terhadap pentingnya jalur komunikasi yang terbuka. Proses komunikasi yang jelas dan terbuka seperti yang diamati dalam implementasi kebijakan kurikulum Merdeka di SMK Negeri Kabupaten Batu Bara merupakan faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Tiga indikator kunci dalam kerangka teori, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi, juga dapat ditemukan dalam hasil penelitian. Proses komunikasi yang baik, bebas ambiguitas, konsisten, dan dapat diadaptasi pada berbagai tingkat eksklusivitas, memastikan bahwa informasi mencapai implementator tanpa distorsi tujuan kebijakan. Dengan demikian, temuan penelitian mendukung

konsep bahwa komunikasi yang baik merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan kurikulum Merdeka di SMK Negeri Kabupaten Batu Bara sangat beragam, melibatkan sumber daya manusia, informasi, sumber daya anggaran, kewenangan, serta sumber daya perlengkapan/fasilitas. Sumber daya manusia, terutama guru yang memiliki sertifikat Guru Penggerak dan sertifikat pendidik, telah terbukti memadai dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Sumber daya anggaran, yang berasal dari dana BOS dan dikelola dengan wewenang penuh oleh kepala sekolah, juga memberikan kontribusi penting.

Kesesuaian hasil penelitian dengan kerangka teori Edwards III terletak pada penekanan terhadap aspek sumber daya yang tersedia. Staff yang kompeten, informasi yang akurat, otoritas yang formal, dan fasilitas fisik yang memadai adalah faktor-faktor yang ditekankan dalam kerangka teori tersebut. Dukungan sumber daya yang ditemukan dalam penelitian sejalan dengan pandangan Edwards III bahwa aspek-aspek ini penting untuk mewujudkan rencana dan mencapai tujuan kebijakan.

Dari hasil penelitian dan kerangka teori, terlihat bahwa SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara telah berhasil memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Keberhasilan ini terlihat dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, pengelolaan anggaran yang efektif, dan fasilitas fisik yang memadai. Sementara kerangka teori Edwards III memberikan pandangan yang kuat

tentang pentingnya sumber daya dalam keberhasilan implementasi kebijakan, hasil penelitian ini juga memberikan gambaran konkret bagaimana faktor-faktor ini berperan dalam konteks kurikulum Merdeka di SMK Negeri. Peneliti percaya bahwa keselarasan antara tujuan kebijakan dan ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Dukungan sumber daya yang baik tidak hanya mencakup jumlah, tetapi juga kualitas dan efektivitas penggunaannya. Kesenambungan pendidikan yang berkualitas dapat dicapai dengan memastikan bahwa sumber daya manusia, informasi, anggaran, kewenangan, dan fasilitas terlibat secara sinergis dan berkesinambungan dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan.

3. Dalam implementasi kurikulum Merdeka di SMK Negeri Kabupaten Batu Bara, disposisi diterapkan melalui penempatan staff dalam struktur organisasi sekolah yang bersifat birokratis. Sistem organisasi yang menggunakan garis komando dan garis koordinasi menjadi landasan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan organisasi, dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama. Selain itu, strategi penerapan kurikulum Merdeka melibatkan pembentukan tim fasilitasi proyek penguatan profil Pancasila tanpa pemberian insentif khusus.

Kerangka teori George Edward III memberikan pandangan tambahan tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis disposisi. Efek disposisi menyoroti hambatan potensial jika staff tidak sepenuhnya menerapkan kebijakan yang diminta oleh pejabat senior, menekankan pentingnya komitmen individu terhadap kebijakan yang sesuai dengan

kebutuhan publik. Penataan birokrasi menjadi kunci dalam implementasi kebijakan, dengan restrukturisasi birokrasi dan penyesuaian regulasi sebagai langkah-langkah yang penting. Insentif, menurut Edward III, menjadi strategi yang dapat digunakan untuk memotivasi pelaksana kebijakan.

Dari hasil penelitian dan kerangka teori, terlihat bahwa disposisi dalam implementasi kurikulum Merdeka di SMK Negeri Kabupaten Batu Bara telah diintegrasikan secara efektif melalui sistem organisasi birokratis. Penempatan staff, penanggung jawab kepala sekolah, dan pembentukan tim fasilitasi proyek menjadi langkah-langkah strategis untuk mendukung implementasi kebijakan. Kerjasama tanpa insentif khusus dalam tim fasilitasi proyek menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap pencapaian tujuan kurikulum Merdeka.

Peneliti percaya bahwa pendekatan birokratis yang terorganisir dan penggunaan strategi tanpa insentif khusus dapat menciptakan atmosfer kerja yang berorientasi pada tujuan bersama. Disposisi individu dalam melaksanakan kebijakan menjadi kunci, dan ketika komitmen terhadap tujuan bersama dijunjung tinggi, hasilnya dapat mencapai dampak positif yang berkelanjutan. Fleksibilitas dan adaptabilitas dalam organisasi birokratis juga menjadi faktor kunci dalam mengatasi hambatan dan memastikan kesinambungan dalam implementasi kebijakan.

4. Dalam implementasi kebijakan kurikulum Merdeka di SMK Negeri Kabupaten Batu Bara, dukungan struktur birokrasi diterapkan melalui pembentukan struktur organisasi sekolah dan Tim Fasilitasi Proyek Profil Pancasila. Standard Operasional Prosedur (SOP) atau KOSP digunakan

sebagai landasan operasional dalam kegiatan sehari-hari. KOSP memberikan panduan rinci mengenai cara mendekati pembelajaran, teknik penilaian, dan penggabungan nilai-nilai dalam kurikulum. Dokumen ini juga menyediakan struktur yang jelas untuk memaksimalkan pengalaman belajar siswa, mengakomodasi keberagaman, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang melibatkan dan inklusif.

Kerangka teori George Edward III memberikan perspektif yang memperkuat pendekatan ini. Struktur birokrasi dianggap sebagai faktor keempat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Menurut teori ini, hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan menyesuaikan SOP untuk mengakomodasi perubahan di lapangan dan dengan membagi serta mendelegasikan wewenang kepada tim yang terkoordinasi. Ini menggambarkan keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka di SMK Negeri Kabupaten Batu Bara dengan memadukan SOP yang fleksibel dan pendelegasian wewenang yang terorganisir.

Melalui hasil penelitian dan kerangka teori, tampak bahwa dukungan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan kurikulum Merdeka di SMK Negeri Kabupaten Batu Bara telah terorganisir dengan baik melalui penerapan KOSP. Pendekatan ini, yang mencakup SOP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan pendelegasian wewenang yang terkoordinasi, memberikan petunjuk jelas dan operasional untuk pendidik dan staf sekolah.

Peneliti mengapresiasi pendekatan yang terstruktur dan terorganisir dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Fleksibilitas SOP untuk mengakomodasi perubahan lapangan mencerminkan responsibilitas terhadap

kebutuhan nyata di tingkat sekolah. Pendelegasian wewenang yang terkoordinasi juga menunjukkan bahwa setiap tim memiliki peran yang terdefinisi dengan baik, mendukung kerja sama antarunit dalam mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini tampaknya menciptakan lingkungan pembelajaran yang adaptif dan inklusif, mencerminkan semangat dari konsep Kurikulum Merdeka.

5. Dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan analisis data yang merujuk pada teori Edwards III, dapat disimpulkan bahwa SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara telah berhasil mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Keberhasilan ini tercermin dalam ketersediaan informasi yang jelas, dukungan sumber daya yang memadai, integrasi disposisi yang positif, dan dukungan struktur birokrasi yang terorganisir. Implementasi yang berhasil ini memastikan ketercapaian tujuan kurikulum Merdeka dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan konsep Kurikulum Merdeka.

Di Kabupaten Batu Bara, implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri berhasil membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Proses komunikasi yang terbuka dan jelas menjadi pilar keberhasilan, memastikan informasi mengalir dengan lancar dari tingkat puncak hingga guru. Forum-forum seperti sosialisasi, webinar, workshop, dan pelatihan menjadi sarana efektif dalam menyampaikan visi kurikulum secara seragam.

Dukungan sumber daya yang beragam, melibatkan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas, memberikan kontribusi penting terhadap keberhasilan implementasi. Guru yang memiliki sertifikat Guru Penggerak dan sertifikat pendidik menjadi aset berharga dalam mendukung kurikulum Merdeka.

Pengelolaan anggaran dari dana BOS, yang diawasi oleh kepala sekolah, juga menjadi kontributor utama.

Disposisi individu terhadap kurikulum Merdeka terlihat terintegrasi secara efektif melalui sistem organisasi birokratis. Penempatan staf, penanggung jawab kepala sekolah, dan pembentukan tim fasilitasi proyek menjadi langkah-langkah strategis untuk mendukung implementasi. Adanya dedikasi dan komitmen dalam tim fasilitasi proyek, meskipun tanpa insentif khusus, menunjukkan semangat untuk mencapai tujuan bersama.

Dukungan struktur birokrasi tercermin melalui penerapan KOSP, SOP yang dapat disesuaikan, dan pendelegasian wewenang yang terkoordinasi. Fleksibilitas SOP mencerminkan tanggapan terhadap kebutuhan lapangan, sementara pendelegasian wewenang yang terkoordinasi menciptakan lingkungan pembelajaran yang adaptif dan inklusif.

Dengan sinergi semua komponen tersebut, SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara berhasil menciptakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan konsep Kurikulum Merdeka. Keberhasilan implementasi ini bukan hanya mencapai tujuan kurikulum Merdeka, tetapi juga menciptakan fondasi untuk pendidikan berkualitas yang berkelanjutan.

## **5.2. Implikasi**

Temuan dan hasil penelitian yang dilakukan ini menggambarkan bahwa proses analisis implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara yang didasarkan pada pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka sesuai Permendikbudristek No. 56/M/2022 dan No. 262/M/2022 masih

perlu diperbaiki dan dianalisis sesuai kondisi ideal terhadap proses penerapannya, sehingga hal tersebut dapat mengimplikasikan beberapa hal berikut :

1. Menyelaraskan proses komunikasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa informasi dapat dipahami dengan jelas di semua tingkatan.
2. Meningkatkan transparansi komunikasi dari puncak ke bawah untuk meminimalkan risiko miskomunikasi dan memastikan bahwa pesan kebijakan sampai pada implementator dengan jelas dan akurat.
3. Mempertahankan dan menambah ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, memastikan pengelolaan anggaran yang efektif, dan menjamin fasilitas fisik yang memadai untuk mendukung langkah-langkah implementasi kebijakan.
4. Melakukan evaluasi rutin terhadap kebutuhan sumber daya untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan kebijakan dan kebutuhan lapangan.
5. Mengoptimalkan disposisi individu dengan memperhatikan faktor efek disposisi, meningkatkan penataan birokrasi yang berkelanjutan, dan merancang insentif yang relevan untuk mendorong keterlibatan aktif dalam implementasi kebijakan.
6. Menyusun strategi konkrit untuk mempertahankan dan memperkuat disposisi positif, termasuk insentif yang dapat memberikan motivasi tambahan bagi pelaksana.
7. Memastikan SOP yang fleksibel untuk mengakomodasi perubahan lapangan dan memudahkan adaptasi kebijakan yang baru.



8. Menerapkan pendelegasian wewenang yang terkoordinasi untuk memastikan tugas dan tanggung jawab terdistribusi secara efisien dan efektif di semua tingkatan struktur birokrasi.
9. Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri Kabupaten Batu Bara tercapai melalui dukungan dalam komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi seperti yang telah diuraikan..
10. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses evaluasi untuk memastikan keterlibatan aktif mereka dalam memahami dan merespon hasil penelitian.
11. Menggunakan temuan penelitian sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam implementasi kebijakan kurikulum Merdeka di SMK Negeri Kabupaten Batu Bara.

### 5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian tentang manajemen implementasi kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara, maka dapat diajukan saran kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Kepada Pemerintah pembuat kebijakan, agar melakukan upaya peningkatan dukungan sumber daya, yaitu dengan :
  - a. Meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan kurikulum Merdeka di SMK Negeri.
  - b. Memastikan ketersediaan fasilitas fisik yang memadai dan pelatihan yang sesuai bagi para guru.

- c. Mengoptimalkan proses komunikasi antara pemerintah, Dinas Pendidikan, dan sekolah.
  - d. Menyelenggarakan forum yang berkala untuk menyampaikan informasi terkini, mendengar umpan balik, dan menjelaskan perubahan kebijakan dengan jelas.
  - e. Merancang kebijakan insentif yang dapat mendorong disposisi positif dan keterlibatan aktif para implementator, terutama guru. Insentif dapat melibatkan penghargaan, pengakuan, atau bentuk insentif lain yang sesuai.
  - f. Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang teratur untuk mengukur kemajuan implementasi kurikulum Merdeka. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan dan penyesuaian strategi implementasi.
2. Kepada Kepala Sekolah SMK sebagai Implementator Kebijakan :
- a. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan secara berkala untuk para guru dalam hal strategi pengajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Fokus pada penguatan keterampilan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran.
  - b. Menjamin transparansi dalam komunikasi internal di sekolah. Informasi seputar kebijakan, perubahan, dan tujuan kurikulum Merdeka harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami kepada seluruh staf sekolah.
  - c. Mendorong partisipasi aktif para guru dalam pengembangan dan implementasi kurikulum Merdeka. Melibatkan mereka dalam proses

pengambilan keputusan dan memberikan dukungan untuk merancang strategi pembelajaran yang inovatif.

d. Mengelola sumber daya manusia dan anggaran dengan efektif, memastikan distribusi yang adil dan efisien. Membuat kebijakan pengelolaan sumber daya yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran.

3. Kepada para guru, khususnya Guru SMK, disarankan agar :

a. Terus meningkatkan kapasitas diri dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan diri. Memanfaatkan berbagai sumber daya dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah dan sekolah.

b. Aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Menyampaikan ide dan masukan untuk perbaikan berkelanjutan.

c. Membangun kolaborasi antar guru untuk pertukaran pengalaman dan pembelajaran bersama. Membentuk kelompok kerja atau komunitas pembelajaran profesional untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.

d. Bersiap untuk adaptasi terhadap perubahan dalam kebijakan dan kurikulum. Mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas dalam merancang pembelajaran sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka.

4. Bentuk saran kepada orang tua dan masyarakat:

a. Mendorong orang tua untuk memberikan dukungan aktif terhadap implementasi kurikulum Merdeka dengan terlibat dalam kegiatan

sekolah, mendukung pembelajaran di rumah, dan berkomunikasi dengan guru secara terbuka.

- b. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Meningkatkan partisipasi dalam forum diskusi dan pertemuan sekolah.
- c. Mendorong peran komite sekolah dalam pengambilan keputusan sekolah. Komite dapat menjadi wadah untuk memberikan masukan dan saran terkait implementasi kebijakan.

